TAJUK RENCANA

Tinjau Kenaikan PPN 12 Persen

KEBIJAKAN kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen yang akan diberlakukan pada tahun 2025 memantik kontroversi di masyarakat. Kebijakan tersebut muncul di tengah situasi politik yang menghangat, terutama terkait dengan pemilihan presiden 2024. Masyarakat masih terpolarisasi dalam kelompok pendukung capres-cawapres.

Dalam perkembangannya, situasi kian menghangat ketika dicurigai terjadi kecurangan dalam Pemilu 2024, mulai dari penggelembuhan suara, tidak beresnya Sirekap dan sebagainya. Perhatian masyarakat tersedot pada situasi politik di Tanah Air. Di saat seperti itulah muncul kebijakan dari pemerintah berupa kenaikan PPN 12 persen. Awalnya, kebijakan yang berasal dari UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dianggap sebagai hal biasa saja, namun belakangan ramai diperdebatkan, karena konsekuensinya sangat serius bagi kehidupan masyarakat, terutama kalangan menengah.

Masyarakat, terutama kalangan menengah dengan gaji antara Rp 4 juta hingga Rp 5 juta perbulan akan merasakan dampak kebijakan tersebut (KR 20/3). Dikhawatirkan, bila kebijakan itu benar-benar diterapkan, daya beli masyarakat menengah akan menurun, bahkan tak tertutup kemungkinan akan turun level menjadi masyarakat miskin. Apalagi mereka tak memiliki cadangan dana atau jaring pengaman untuk ketahanan hidup. Berbeda dengan masyarakat miskin yang mendapat bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.

Hal yang agak aneh, belakangan ini DPR bersuara keras mengkritisi kebijakan pemerintah terkait kenaikan PPN 12 persen. Mengapa baru sekarang ? Bukankah DPR terlibat dalam pembahasan UU No 7 Tahun 2021 tentang HPP ? Apakah ini hanya sekadar pengalihan perhatian ketika elemen masyarakat mempersoalkan hasil pemilu yang dinilai penuh kecurangan ?

Terlepas apa pun jawabannya, kebijakan kenaikan PPN 12 persen memang layak ditinjau kembali. Kalaupun DPR mengusulkan agar penerapan kebijakan tersebut menunggu pemerintahan yang akan datang, tak serta merta menyelesaikan persoalan. Sebab, persoalannya justru muncul ketika DPR bersama pemerintah menyetujui UU tentang HPP. Artinya, DPR tak bisa kemudian melepas tanggung jawab dan menyerahkan kepada pemerintah. Sebab, UU selalu dibuat oleh DPR atas persetujuan pemerintah.

Kita menilai kenaikan PPN 12 persen tidak tepat karena situasi perekonomian belum membaik, daya beli masyarakat masih lemah, tingkat inflasi masih tinggi yang ditandai dengan naiknya bahan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng dan sebagainya. Kita membutuhkan empati dari pemerintah dan DPR untuk memahami kehidupan masyarakat, terutama di level menengah ke bawah.

Harus diakui, kelompok menengah menjadi sangat rentan terdegradasi kehidupan ekonominya dan rawan jatuh ke level miskin. Kita memahami cara paling gampang bagi pemerintah untuk meningkatkan anggaran pendapatan negara melalui pajak. Masyarakat sudah terlalu banyak dibebani beraneka macam pajak. Karenanya, bila PPN dinaikkan, dikhawatirkan akan mengurangi daya beli masyarakat. Seharusnya, pemerintah melakukan terobosan untuk meningkatkan pendapatan negara di luar pajak. ❑-d

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik

Naskah dikirim Email atau WA

pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Mudik Gratis PLN, Ada dari Yogya?

SAYA membaca di media, PLN juga memberikan fasilitas bagi pelanggan untuk mudik gratis. Mudik ini guna mengalihkan pengguna kendaraan pribadi khususnya sepeda motor ke kendaraan umum. Pendaftaran Mudik Gratis Bersama PLN 2023 bisa dilakukan hanya melalui aplikasi PLN Mobile. Pendaftaran dibuka untuk 2 tahap. Benarkah, hanya melayani dari Bandung, Surabaya dan Bali. Khusus untuk dari Jabodetabek, dengan tujuan kota-kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bandar Lampung dan Palembang.

Apa ada yang yang berangkat dari Yogya? Kalau ada kami dan banyak pelanggan PLN dari DIY siap mengikuti. ❑-d

***) Ir Budi Sanjaya,** *Iromejan Gondokusuman, Yogyakarta.*

Trafiic Light Jalan Gajah Mada Merah Terus

SENIN (18/3) kami melewati Jl Gajah mada menuju Jl Hayam Wuruk. Sampai di simpang empat berhenti karena lampu berwarna merah, sekitar 10.30. Ada sekitar 4 mobil dimana satu di antaranya sedan polisi dan beberapa kendaraan sepeda motor. Tiba-tiba kendaraan di depan maju namun hanya sejenak sudah berhenti lagi. Mungkin hanya 2 mobil yang jalan.

Kami baru bisa melihat suasana simpang empat. Dimana kendaraan dari arah lain lewat. Sampai harusnya dari Selatan lewat, lampu tetap merah. Tampaknya lampu konslet dan tidak bisa bereganti hijau ataupun kuning. Ini tentu sangat berbahaya apalagi tidak ada polisi di kawasan tersebut. Semoga saja hari itu tidak ada kecelakaan dan sekarang kondisinya sudah diperbaiki. Jika belum mohon perhatian. ❑-d

***) Poerwanto,** *Wonocatur Banguntapan Bantul*

'Electoral Authoritarian' dan Pemilu 2024

M Taufik Firdaus & William E Aipipidely

PEMILU 2024 masih menyisakan banyak catatan penting ikhwal demokrasi dan kepemiluan. Benar, ada banyak perdebatan teroritik dan praktis disana. Salah satunya adalah pemilu ini berbau *electoral authoritarian.*

Dalam negara demokrasi, rakyat sebagai puncak kedaulatan tertinggi. Demokrasi sebagai suatu sistem berdiri tegak pada dua prinsip: kebebasan (*liberty*) dan kesederajatan (*equality*). Kebebasan secara *mutatis mutandis* berarti kebebasan yang bertanggung jawab dalam batas-batas konstitusi, hukum, etika dan moral bangsa.

Sementara kesederajatan bicara soal akses keadilan, hukum, ekonomi, sosial dan politik. Kebebasan dalam sistem demokrasi bertujuan untuk menghilangkan pengekangan, dominasi dan kesewenang-wenangan. Kesederajatan berkutat pada: melawan praktik diskriminasi dan ketidakadilan. Maka, sistem demokrasi menjadi model yang paling unggul. Model demokrasi menutup ruang menjadi negara yang otoriter.

Ciri Demokrasi

Robert Dhal mengatakan demokrasi memiliki kelebihan dibandingkan dengan sistem politik yang lain. *Pertama*, demokrasi menolong mencegah tumbuhnya pemerintahan kaum otokrat yang kejam dan licik. *Kedua*, demokrasi menjamin bagi warga negara sejumlah hak asasi yang tidak diberikan sistem-sistem yang tidak demokratis. *Ketiga*, demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas sebagai warga negara.

G. Bingham Powell Jr mengatakan, salah satu ciri dari negara demokrasi adalah terlaksananya pemilihan umum. Ia juga memberikan sejumlah kriteria negara yang demokratis. *Pertama*, pemerintah mengklaim mewakili hasrat para warganya. *Kedua*, klaim itu didasarkan pada adanya pemilihan kompetitif secara berkala antara calon alternatif. *Ketiga*, pemilihan umum yang bebas. Pemilu sebagai sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat

Namun tren global negara demokrasi mengalami suatu anomali. Negara demokrasi secara *genuine* harusnya mejauhkan diri dari praktik otoritarian justru dengan atas nama demokrasi, muncul *electoral authoritarian* dan gejala *autocratic legalism* dalam praktik penyelenggaraan negara, termasuk urusan dalam pemilu. Andreas Schedler, mendefinisikan *electoral authoritarian*, sebagai rezim otoriter yang menyelenggarakan pemilu. Tapi pemilu hanya jadi alat terus berkuasa. Pemilu dimanipulasi

KR-JOKO SANTOSO

sedemikian rupa agar penguasa terus punya kekuasan.

Dalam proses *electoral authoritarian*, hasil pemilu sangat ditentukan selera penguasa. Sehingga dalam proses ini, pemilu tidak lagi menjadi sarana demokratis, namun menjadi arena untuk melanggengkan kekuasaan dalam bungkus demokrasi. Pemilu hanya menjadi syarat prosedural semata. Otokrasi jenis baru ini menegasikan elemen penting dari konstitusi, supremasi hukum, akuntabilitas politik, integrasi birokrasi dan kedaulatan rakyat.

Sementara *autocratic legalisme* adalah sebagaimana dijelaskan Kim Lane Schappele merupakan praktik dari para pemimpin yang dipilih secara demokratis menggunakan mandat demokrasi untuk mengubah sistem konstitusi dan hukum dengan tujuan mengkonsolidasikan kekuasaan dan kepentingan politiknya. Zainal Arifin Mochtar merumuskan bagaimana praktik *autocratic legalism* dapat diketahui melalui analisa terhadap beberapa ciri-ciri. Salah satunya adalah menciptakan pola intervensi kooperatif yang dapat mengganggu independensi peradilan dengan berbaagai cara, misalnya mengubah komposisi hakim.,

Jurang Otoritarian

Melihat Pemilu 2024, dua praktik tersebut secara terang dilakukan penguasa untuk melanjutkan pengaruh, kekuasaanya dan mendorong demokrasi Indonesia ke jurang rezim otoritarian. Dibawah kendali penguasa, lembaga negara seperti Legislatif dan Yudikatif telah terkooptasi dengan menjadi penyokong utama dari praktik tercela tersebut. DPR tidak lagi menjadi penyeimbang kekuasaan. Tidak ada *check and balances*!

Sementara Mahkamah Konstitusi, menjadi arena untuk melegitimasi praktik ini. Dengan menggunakan fasilitas negara dan kewenangan yang dimiliki, kelompok ini menjadikan pemilu kehilangan sisi krusial bagi masyarakat. Dalam rezim *electoral authoritarian*, pemenang telah ditentukan jauh sebelum pertandingan dimulai. ❑-d

***) Muhammad Taufik Firdaus,** *Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik UMY dan Pekarya Satunama Program Sekolah Politisi Muda.*

***) William E Aipipidely,** *Pengajar Sekolah Politisi Muda*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat.* Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

'Logos', 'Ethos' dan 'Pathos' Pendidik

P Joko Purwanto

"Speech is power: speech is to persuade, to convert, to compel."
(Ralph W Emerson)

DENGAN kebijaksanaan seorang filsuf terkemuka, Ralph Waldo Emerson, kita diingatkan akan kekuatan kata-kata dalam membentuk pandangan. Bagi seorang pendidik, kemampuan berbicara dengan jelas menjadi kunci dalam menyampaikan pelajaran dengan efektif. Tulisan ini, kita akan menjelajahi tiga elemen penting retorika: *Logos, Ethos* dan *Pathos* sebagai alat yang berguna bagi pendidik dalam menciptakan pengalaman pembelajaran yang komprehensif.

Dengan *logos* pendidik mampu membangun dasar yang kuat bagi pemahaman konsep dengan menggunakan logika, argumen rasional, dan fakta. *Ethos* menekankan pentingnya karakter dan kredibilitas seorang pendidik, menggarisbawahi profesionalisme, pengetahuan yang mendalam, dan sikap etis. Sementara itu, *pathos* memperkenalkan dimensi emosional dalam pembelajaran, merangsang perasaan dan menciptakan koneksi yang lebih mendalam antara materi pelajaran dan siswa.

Pembahasan bertujuan memberikan panduan praktis bagi para pendidik dalam merancang strategi pembelajaran yang berdampak

Suatu Seni

Penggunaan logika dalam konteks pendidikan adalah suatu seni yang membutuhkan kecermatan dan kejelasan. Logika, yang mengacu pada pemakaian pemikiran yang rasional dan argumentasi yang kokoh, menempatkan pendidik dalam posisi untuk membentuk fondasi pengetahuan yang solid bagi para siswa. Sebagai seorang pendidik, penggunaan data, fakta, dan argumen yang terstruktur dengan baik adalah kunci dalam menyampaikan pelajaran secara efektif.

Penggunaan logika dalam pendidikan bukan hanya tentang menyajikan fakta dan data. Tetapi juga tentang membantu siswa membangun hubungan logis antara konsep-konsep yang diajarkan. Kesuksesan penggunaan logika dalam pendidikan juga tergantung pada kemampuan pendidik untuk menyajikan informasi secara jelas dan terstruktur. Analogi, ilustrasi, dan perbandingan logis dapat menjadi alat yang efektif untuk membantu siswa memahami konsep yang kompleks.

Dalam dunia pendidikan, karakter dan kredibilitas seorang pendidik memiliki peranan yang tak terbantahkan. Profesionalitas, pengetahuan yang mendalam, dan sikap etis menjadi bagian tak terpisahkan dari karakter seorang guru. Dengan terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler dan memberikan bimbingan, seorang pendidik dapat membangun hubungan yang erat dengan siswa-siswinya.

Karakter dalam pendidikan bukan hanya tentang membangun reputasi, tetapi juga menciptakan dasar karakter yang akan membentuk arah perkembangan siswa. Dengan memadukan profesionalisme, pengetahuan, sikap etis, dan keterlibatan aktif, seorang pendidik dapat menjadi teladan yang memberdayakan dan menginspirasi siswa-siswinya untuk mencapai potensi penuh mereka.

Elemen Emosional

Penting bagi seorang pendidik untuk memahami peran elemen emosional dalam proses pembelajaran. Menggunakan cerita yang menggerakkan, analogi yang relevan, dan memilih kata-kata yang membangkitkan perasaan dapat menciptakan pengalaman yang kuat bagi para siswa. Dalam menyusun strategi pembelajaran, pendidik perlu mempertimbangkan pengalaman pribadi siswa dan memilih contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka.

Memahami dan mengintegrasikan elemen emosional dalam pembelajaran membantu menciptakan lingkungan belajar yang berarti dan memotivasi. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk tidak hanya memahami materi secara intelektual tetapi juga meresapi dengan hati dan emosi yang mendalam.

Sebagai penutup, kita diingatkan bahwa setiap kata yang diucapkan oleh seorang pendidik adalah sebuah investasi dalam masa depan. Dengan memanfaatkan *logos, ethos,P> dan pathos* dengan bijaksana, pendidik dapat menjadi fasilitator pengetahuan, arsitek pembentukan karakter, dan motivator emosional bagi murid-murid mereka. Dengan demikian, kehadiran pendidik tidak hanya diukur dalam pengetahuan yang disampaikan. Tetapi juga dalam jejak etika, karakter, dan ikatan emosional yang mereka tinggalkan di hati murid. ❑-d

***) P Joko Purwanto,** *Guru di Magelang*

Pojok KR

Rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024 selesai.

--Yang tak puas bisa tempuh jalur hukum.

***

ASN tak boleh menolak dipindahkan ke IKN.

-- Konsekuensi menjadi ASN.

***

DPR minta kenaikan PPN 12 persen dikaji ulang.

-- Lebih baik bersuara daripada diam.

Berabé

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. **ISSN:** 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **General Manager :** H Yoeke Indra Agung Laksana, SE. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustiwi, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.